BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

5.1.1. Potensi aparat Satpot terhadap penanganan penertiban PKL Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

Penertiban PKL menjadi pekerjaan pokok, sehingganya dalam penertiban PKL pemantaun yang dilakukan oleh Kasatpol PP sangat penting agar anggota Satpol PP Takut berbuat kasar pada PKL dan Para PKL juga merasa dihargai dikarenakan kehadiran Kasatpol, dan juga dikarenakan hal ini merupakan strategi yang dimainkan Satpol PP agar penertiban bisa berjalan lancar dan tidak terjadi bentrok antara Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima, agar para PKL bersedia dipindahkan ketempat yang telah disediakan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar tidak bertambahnya PKL yang baru, sehingganya pembinaan dan pelatihan yang diberikan pada Satpol PP dimksudkan agar ketika melakukan penertiban anggota Satpol PP sudah bisa mengetahui apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan petunjuk dan instrumen Penertiban, agar bisa membuat para PKL tidak lagi berjualan ditempat yang tidak diperuntukan sebagai lokasi berjualan agar tercipta ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban umum di Kecamatan Tilamuta.

5.1.2. yang menjadi hambatan penanganan penertiban Satpol terhadap PKL Di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

Kurangnya sarana prasarana seperti ketika Satpol PP melakukan penertiban, tidak dilengkapi dengan tameng atau pentungan, sehingga perlawanan yang dilakukan oleh para

PKL tidak bisa dihindari dan akhirnya memancing emosi Polisi Pamong Praja dikarenakan masih kurangnya pelatihan yang diberikan pada Polisi Pamong Praja, sehingga penertiban PKL belom bisa berjalan dengan baik, sehingganya kelengkapan sarana prasarana dan kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki lima.

5.1.3. Upaya yang dilakukan satpol dalam mengatasi hambatan dalam penanganan penertiban PKL Di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

Satpol PP sudah berupaya melakukan yang terbaik dengan melakukan penertiban terhadap PKL untuk nantinya Direlokasi ketempat yang telah disediakan agar lebih mudah menata dan mengatur Pedagang Kaki Lima agar tidak menggangu arus jalan raya dan ketertiban umum, sehingganya untuk menghindari kelebihan kapasitas tempat berjualan PKL maka dibuatlah shift atau jadwal bergantian, dengan membuat Pos pengaduan agar Satpol PP dapat mengontrol Para PKL demi ketertiban umum.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Tilamuta hendaknya bisa lebih tegas dalam menertibkan PKL agar PKL mau ditata dengan baik dan rapi agar tercipta kenyamanan dan ketertiban umum.
2. Bagi pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan peraturan dan melakukan sosialisasi agar para Pedagang Kaki Lima mengetahui secara pasti mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan juga melengkapi sarana dan prasarana guna memperlancar proses penertiban PKL.

3. Bagi PKL di kecamatan Tilamuta hendaknya menaati peraturan-peraturan yang berlaku demi kepentingan bersama.
4. Bagi penelitian berikutnya semoga ada pengkajian mengenai penertiban PKL dan penataanya, sehingga bisa diketahui cara menertibkan PKL dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rineka Cipta*

Aulia Insani Yunus, 2011. *Potret Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar* (*Kasus Penjual Pisang Epe Di Pantai Losari)***.** Skripsi. Universitas Hasanuddin : Makassar

Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenata Media Group

Febry Setyo Haryon, 2005. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Di Kabupaten Bekasi*

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesi, 2007. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*

Miriam Budiarjo, 2008 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi Cetakan Pertama. Jakarta: PT Ikrarmandiri Abadi

Munir R. Fitanto B. 2005. *Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah, Kebijakan Dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan*. Jakarta: Local Governance Support Program (LGSP) USAID

Soetomo, 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta Pustaka Pelajar

Sri Wahyuni, Agustinus, 2006. *Manajemen Strategik. Pengantar Proses Berpikir Strategik*. Binarupa Aksara : Jakarta

Thomas R. Dye. 2005. *Understanding Public Policy*. Ed.11. New Jersey: Prentice Hall.